

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdulkadir Muhamad, *Segi Hukum Lembaga keuangan dan Pembiayaan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010.
- Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, Surabaya, PT Bina Ilmu, 1982.
- Adolf, Huala, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Jakarta, Rajawali, 1991.
- Adrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Cetakan ke-1, PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- AP Parlindungan, *Komentar Undang-Undang Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan tanah*, Bandung, Mandar Maju, 1996.
- Arie S Hutagalung, *Serba Aneka Masalah Tanah Dalam Kegiatan Ekonomi (Suatu Kumpulan Karangan)*, Depok, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002.
- Bachtiar Effendie, *Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung, Mandar Maju, 2003.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta, Djambatan, 2005.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta, Djambatan, 2008.
- Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, Jakarta, Nuansa Madani, 2011.
- Efendy Perangin, *Praktek Penggunaan Tanah Sebagai Jaminan Kredit*, Jakarta, Rajawali Pers, 1991.
- Effendi Parangin, *Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, 1991.

- Effendi Peranginangin, *Hukum Agraria Di Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, 2007.
- H. Salim HS., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta, Radja Grafindo Persada, 2005.
- H. Salim, HS., *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016.
- Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2008.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung, Refika Aditama, 2009.
- Hans Kelsen, *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta, BEE Media Indonesia, 2007.
- Hans Kelsen, *sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni*, Bandung, Nuansa & Nusa Media, 2006.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*. Bandung, Cetakan VII, Nusa Media, 1971.
- Heo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Kasius, 1982.
- Herowati Poesoko, *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT*, Yogyakarta, Lakbang Presindo, 2007.
- HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006.
- Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya, Arkola, 2002.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hukum Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, Bandung, Buku 1, Citra Aditya Bakti, 1997.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung, Cetakan Ketiga, Citra Aditya Bakti, 1996.
- Jan Michael Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, J Jakarta Jakarta, Terjemahan Tristam Moeliono, Komisi Hukum Nasional, 2003.

- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Cet. I. Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2006.
- Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Hak-hak Atas Tanah*, Jakarta, Kencana, 2008.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2005.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002.
- Peter Mahmud Marsuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Predana Media Group, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Predana Media Group, 2005.
- Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan*, Semarang Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2006.
- Rachmadi Usman, *Pasal-Pasal Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah*, Jakarta, Djambatan, 1999.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Karta Winata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju, 1997.
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006.
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, FHUI Pascasarjana, 2003.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013.
- Salim Hs, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Depok, Raja grafindo Persada, 2004.
- Sitompul, Josua, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta, Tatanusa, 2012.
- Soekanto, Soerjono, *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2002.

Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, Jakarta, cetakan keempat, Universitas Indonesia, 1999.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1986.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermedia, 1985.

Supriadi, *Hukum Agraria*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.

Sutan Remy Syahdeini, *Hak Tanggungan, Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004.

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta, cetakan ke- 2, Sinar Grafika, 2007.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria ;

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.

### C. Artikel, Jurnal dan Makalah

Arkisman, Nandatama Ayu Lafitri, “Kepastian Hukum Sertipikat Hak Tanggungan Elektronik dalam Hukum Pembuktian di Peradilan menurut Hukum Perdata” Jurnal Hukum Universitas Gersik, 11.

Syafrudin Ateng, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab”, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, 22.

Boedi Harsono, “PPAT Sejarah dan Kewenangannya”, Majalah RENVOL, Nomor 844, IV, Januari 2007. 11

Denira Palmanda Sedana & I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati, “Kedudukan Dan Kekuatan Surat Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata”, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana. 8

Dwina Natania, “Penyampaian Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah setelah diberlakukannya Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi secara elektronik”, Bandung, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Unpad Vol. 3, No. 2 Juni 2020, 283.

Ibrahim Swardika dan Wibisono. “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah”. Jurnal Ilmiah Progdi Magister Kenotariatan 2013-2014. 124-134.

Nadia Imanda, “Lahirnya Hak Tanggungan Menurut Peraturan Pemerintah Agraria Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik” Notaire, Volume 3 No. 1, Februari 2020. 160

Padam Nurwulan, ”Implementasi Pelayanan Hak Tanggungan Elektronik Bagi Kreditor dan Pejabat Pembuat Akta Tanah”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , Volume 28 Issue 1, Januari 2021. 197

Purna Noor Aditama, “Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Pada Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli”, Lex Renaissance, Volume 3, Nomor 1, 2018, 196.

Triyono, “Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah dan Implikasi Hukumnya Bagi Masyarakat Umum”, *Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, Vol. 17, No. 2, 2019, 172.

Yudhis Tira Cahyono, “*Eksekusi Hak Tanggungan yang menggunakan upaya Parate Eksekusi Studi Kasus Putusan Nomor 26/PDT.G/2013/PN.Psb.Shb*”, *Jurnal Hukum Program Studi Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*. 16.

#### **D. Kamus**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta, 2008.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.

#### **E. Wawancara**

Notaris Dewi Susiana, Wawancara dengan penulis, Kantor Notaris di Kabupaten Tangerang.

Tuan Fadli. Wawancara dengan penulis di Bank BJB Kantor Cabang Tangerang.

#### **F. Informasi dari Internet**

Admin, 2019, “Orkestrasi Layanan Pertanahan Terpadu, ATR/BPN Luncurkan Layanan Elektronik” diakses melalui <https://jakartanews.id/2019/09/05/orkestrasi-layanan-pertanahan-terpadu-atr-bpn-luncurkan-layanan-elektronik/>. (12 Mei 2021)

Andi Asrianti, 2013, “Teori Kewenangan”, diakses dari: [www:http://andi-asrianti.blogspot.com](http://andi-asrianti.blogspot.com). (27 Maret 2021)

Agus Suharyono “Mengkritisi Layanan Hak Tanggungan Elektronik” diakses melalui [www.kompasiana.com/agussuhariono8044/5d5a106c0d82302352104942/mengkritisi-layanan-hak-tanggungan-elektronik?page=8](http://www.kompasiana.com/agussuhariono8044/5d5a106c0d82302352104942/mengkritisi-layanan-hak-tanggungan-elektronik?page=8) (20 Mei 2021)

Tri Jata Ayu Pramesti, “Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik Melakukan Pendaftaran” diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt598832e6a5643/kewajiban-penyelenggara-sistem-elektronik-melakukan-pendaftaran/> (20 Maret 2021)